
**PENGARUH KENAIKAN UPAH MINIMUM KOTA/ KABUPATEN (UMK)
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA SEKTOR INDUSTRI BATIK
DI KOTA PEKALONGAN**

Tim Lenggang Nyai

Aprillia Argyanti, Dian Nurussobah, Shintya Theodora

argyantiaprillia@gmail.com

Abstract

Artikel ini mengkaji dampak kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) terhadap pertumbuhan ekonomi sektor industri batik di Kota Pekalongan. Peningkatan UMK di Pekalongan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pekerja dan pengusaha, namun juga dapat menimbulkan tantangan baru terkait biaya produksi. Proses penetapan UMK perlu mempertimbangkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi lokal, menjaga daya saing industri, dan menjamin kesejahteraan pekerja. Penulisan artikel ini juga membahas tentang industri batik di Pekalongan, termasuk kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menjelaskan teori upah dan pertumbuhan ekonomi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen. Faktor-faktor seperti perubahan harga, pendapatan riil, nilai tukar, pajak, dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen.

Kata Kunci : Upah Minimum Kota, Pertumbuhan Ekonomi, Industri Batik, Kota Pekalongan, Daya Beli Konsumen

Pendahuluan

Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan batiknya di Jawa Tengah, sehingga banyak dijumpai industri batik di Kota ini. Naiknya UMK berdampak pada daya beli konsumen terhadap batik yang diproduksi oleh industri batik di Kota Pekalongan. UMK adalah upah minimum yang dikenakan pemerintah daerah kepada pekerja

atau pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Peningkatan UMK ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi para pekerja di Kota Pekalongan. Upah yang lebih tinggi meningkatkan daya beli pekerja yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor industri batik di Kota Pekalongan. Penetapan UMK Kota Pekalongan oleh Walikota Pekalongan pada tahun 2024 mendatang menjadi kabar baik bagi masyarakat luas dan pengusaha batik di Kota Pekalongan. Sebagai referensi, UMK Pekalongan 2023 memperhitungkan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah yang melibatkan pengusaha dan serikat pekerja Pekalongan. UMK juga didasarkan pada data statistik dan berbagai pertimbangan seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam penyusunannya. Selain itu juga terdapat faktor alpha seperti kontribusi pekerja industri, investasi yang dilakukan pengusaha, dan harga komoditas dalam penentuan usulan gaji UMK Pekalongan tahun 2023.

FAKTA FAKTA

Berdasarkan data Pemprov Jateng, UMP Jateng pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,02 persen dibandingkan UMP tahun 2023. UMP Jateng sendiri pada tahun 2023 sebesar Rp 1.958.169,69 sehingga meningkat menjadi Rp 2.036.947. Dengan kenaikan UMP, pekerja Jateng dengan masa kerja kurang dari satu tahun akan mendapat upah sebesar Rp 2.036.947. Pegawai yang sudah bekerja lebih dari satu tahun kini digaji berdasarkan UMK. Berdasarkan perhitungan, UMK Kota Pekalongan pada tahun 2024 diperkirakan meningkat sebesar 4,02 persen dibandingkan UMK pada tahun 2023. UMK Kota Pekalongan sebesar Rp2.247.345,90 pada tahun 2023 sehingga meningkat menjadi Rp2.337.689,20. Dengan demikian, seorang pekerja yang telah bekerja di Kota Pekalongan lebih dari satu tahun akan menerima upah sebesar Rp2.337.689,20

Secara undang-undang, pemerintah menetapkan UMR Kota Pekalongan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi perekonomian dan tingkat partisipasi tenaga kerja. Pasal 28D UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan berhak atas imbalan, dengan perlakuan yang adil dan wajar dalam hubungan kerja. Gaji UMR di Kota Pekalongan tahun 2023 sebesar Rp 2.305.822. Hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561 Tahun 2022 tentang Upah Minuman Keras di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Ini yang disahkan pada edisi 2022/54. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Penguatan Nasional Nomor 18 Tahun 2022 dan 2023 tentang pelaksanaan UMP 2023 mengatur bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja yang telah bekerja pada suatu perusahaan kurang dari satu tahun. UMR Kota Pekalongan 2023 juga didasarkan pada data statistik dan berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Dalam konteks ini, hubungan industrial adalah hubungan antar aktor (pengusaha, pekerja, atau pekerja dengan pemerintah) dalam proses produksi barang dan jasa, dalam mewujudkan kedamaian industri dan upaya sadar untuk mencapai kesejahteraan pekerja.) diartikan sebagai suatu pola hubungan interaktif yang terbentuk antara atau pengembangan pekerja dan bisnis.

Apabila usulan kenaikan gaji UMK Kota Pekalongan tahun 2023 disetujui. Kenaikan upah minimum lokal (UMK) di Kota Pekalongan bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian pengusaha batik. Penerapan UMK di Kota Pekalongan dapat mempengaruhi biaya produksi dan daya beli warga. Menaikkan upah minimum dapat meningkatkan biaya produksi bagi dunia usaha, namun juga dapat meningkatkan permintaan konsumen dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan UMK ini tentunya akan memberikan dampak yang besar baik bagi para pekerja maupun pengusaha di Kota Pekalongan, khususnya pengusaha batik. Hal ini dapat meningkatkan biaya produksi dan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Bagi pengusaha batik yang menghadapi kenaikan biaya tenaga kerja, hal ini berpotensi meningkatkan daya beli pekerja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menimbulkan tantangan baru terkait biaya produksi. Di sisi lain, penerapan UMK di Kota Pekalongan dapat menimbulkan dampak sosial. Memahami upah minimum dapat meningkatkan semangat kerja karyawan dan mengurangi konflik antarpribadi. Di sisi lain, kenaikan upah minimum selain dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja batik juga memberikan tantangan bagi pengusaha batik untuk menjaga kelangsungan usahanya.

Permasalahan

Peningkatan UMP tentu memiliki dampak yang signifikan baik bagi pekerja maupun pengusaha di Kota Pekalongan. Bagi pekerja, kenaikan ini dapat memberikan kelonggaran ekonomi dan meningkatkan daya beli, sementara bagi pengusaha, dapat menimbulkan tantangan baru terkait biaya produksi. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan kajian menyeluruh terkait keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Terdapat kebutuhan untuk mengedepankan dialog konstruktif agar kebijakan yang diambil dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Proses Penetapan UMP dan Tantangan Ekonomi Lokal. Proses penetapan UMP memang menjadi momen yang ditunggu-tunggu, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan nasional. Keputusan yang diambil perlu mempertimbangkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi lokal, menjaga daya saing industri, dan memastikan kesejahteraan pekerja. Pemerintah Kota Pekalongan diharapkan dapat memberikan transparansi dan

menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan UMP. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan mengurangi potensi ketidakpuasan di kalangan pekerja dan pengusaha.

Kenaikan UMP tentunya akan menjadi daya tarik untuk meningkatkan pembelian barang dan jasa masyarakat setempat. Namun, di tengah permasalahan resesi yang lebih luas, peningkatan UMP juga diharapkan dapat membuat masyarakat dapat hidup lebih layak dan tetap menjaga daya belinya. Menurut hukum penawaran dan permintaan, ketika harga naik secara tidak wajar, masyarakat kehilangan keinginan untuk membeli dan daya beli menurun. Akar penyebab rendahnya daya beli adalah kurangnya pendapatan yang pada akhirnya menghalangi rata-rata warga negara untuk membeli banyak barang dan jasa serta menjalani kehidupan yang layak. Harus ada kesesuaian antara pendapatan dan kebutuhan yang dipenuhi.

Peningkatan UMK bisa meningkatkan daya beli masyarakat, sebagai contohnya peningkatan daya beli pada batik. Peningkatan ini mengakibatkan pelaku usaha batik di Kota Pekalongan meningkatkan produksinya. Produksi batik yang meningkat akan mendongkrak perekonomian pekerja batik masyarakat Kota Pekalongan.

Penegasan Judul

Penegasan judul ini diharapkan tidak terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul artikel ini adalah Pengaruh Kenaikan Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Industri Batik di Kota Pekalongan. Penjelasan mengenai istilah - istilah yang digunakan dalam judul artikel ini yaitu :

1. Pengaruh menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah daya yang ada dan timbul dari suatu (benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
2. Upah minimum adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

3. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.
4. Industri Batik di Indonesia umumnya merupakan masyarakat industri kecil menengah (UKM) yang menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat.

Penghasil batik terbesar di Indonesia, salah satunya adalah Pekalongan. Batik Pekalongan diperkirakan berkembang setelah adanya perang kerajaan Mataram (Perang Diponegoro) pada tahun 1825 - 1830. Dengan adanya perang tersebut, batik menyebar ke arah timur dan barat. Pada arah barat ini batik menyebar di Banyumas, Kebumen, Tegal, Cirebon dan Pekalongan. Batik Pekalongan berkembang pesat dibandingkan wilayah lain dan tumbuh disekitar wilayah pesisir.

Alasan pengambilan judul ini mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/54 tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah. Penetapan Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK) oleh Walikota Pekalongan berimbas pada kenaikan upah di Kota Pekalongan yang semula Rp. 2.247.345,90 naik 4.02 persen menjadi Rp2.337.689,20. Upah merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Upah pekerja perlu cukup layak dan terus meningkat supaya dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja dan meningkatkan daya beli masyarakat yang kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak dari kenaikan upah ini menjadi faktor pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang mendapat julukan sebagai Kota Batik. Kota Pekalongan memiliki potensi yang menarik serta ciri khas tersendiri. Salah satu yang berkembang pesat di Pekalongan adalah pariwisata kreatif berbasis industri batik yang dapat dikatakan maju. Hal ini diperkuat setelah UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia pada 2 Oktober 2009, serta penetapan Kota Pekalongan sebagai kota kreatif dunia pada tahun 2010. Batik merupakan salah satu dari kekayaan budaya Indonesia yang memiliki nilai seni tinggi. Setiap daerah di Indonesia memiliki corak batik dengan ciri khas yang berbeda-beda. Hal ini menjadikan batik Indonesia menjadi sangat kaya akan keberagamannya. Batik sebagai warisan budaya memiliki potensi yang besar. Pengakuan oleh UNESCO membuat citra batik semakin terangkat serta semakin dikenal oleh dunia. Batik berpotensi meningkatkan perekonomian nasional melalui pengembangan industri kecil hingga besar. Sebagai warisan budaya, batik

harus terus dilestarikan oleh seluruh masyarakat Indonesia maupun pemerintah. Pekalongan sebagai kota batik memiliki peran yang penting dalam pelestarian serta kemajuan industri batik. Selama puluhan tahun, batik telah menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat di Kota Batik ini. Hampir di setiap sudut Kota Pekalongan, setiap hari para pembatik berbau dengan aroma lilin malam serta pewarna untuk menghasilkan lembaran kain batik yang indah. Pusat perbelanjaan batik tersebar di Pekalongan, mulai dari butik hingga pasar batik. Industri batik menjadi salah satu ikon bangsa Indonesia dari sejak jaman kerajaan dulu kala dan Batik tidak sekedar sebagai secarik kain dan pakaian, pada batik tersebut sarat dengan filosofi budaya bangsa Indonesia khususnya budaya Jawa.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa penyebab naiknya UMK di Kota Pekalongan?
2. Dampak apa yang ditimbulkan dari naiknya UMK terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor industri batik di Kota Pekalongan?

Hasil dan Pembahasan

1. Apa penyebab naiknya UMK di Kota Pekalongan?

- a. Inflasi

Berdasarkan hasil inflasi dari naiknya (UMK) berarti harga - harga barang naik. Jika hal ini terjadi, masyarakat mungkin tidak mampu membeli barang sebanyak itu, sehingga bisnis mungkin tidak akan menjual sebanyak itu. Hal ini dapat menyebabkan bisnis menghasilkan lebih sedikit barang dan tidak membutuhkan banyak pekerja. Jika hal ini terjadi, mungkin akan lebih banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Ini berarti jumlah minimum uang yang harus dibayar seseorang untuk pekerjaan mereka di bidang tertentu. Setiap kota atau wilayah mempunyai upah minimumnya sendiri, yang merupakan jumlah uang terkecil yang dapat dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawannya. Bagaimana keadaan perekonomian, dan beberapa besar kenaikan harga di suatu daerah, karena ketika upah minimum tinggi, lebih banyak orang yang ingin bekerja, namun pada saat yang sama, dunia usaha tidak mau mempekerjakan banyak orang karena harus membayar mereka lebih banyak. Pada bulan Oktober 2023, inflasi dari enam kota

di Jawa Tengah mencapai 0,41% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,59. Dari enam kota dengan tingkat inflasi tertinggi di Jawa Tengah.

b. UMK

Upah Minimum Kota/Kabupaten adalah jumlah uang terendah yang secara hukum diperbolehkan untuk dibayar oleh seseorang atas pekerjaannya di suatu wilayah tertentu. Kota Pekalongan menduduki peringkat ke 6 dalam hal kenaikan upah minimum. Upah minimum 2023 memperhitungkan faktor-faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kenaikan upah minimum kota/kabupaten di Kota Pekalongan sekitar 83 ribu rupiah, yang berarti masyarakat di sana kini berpenghasilan minimal 2.389.801 rupiah. Peningkatan ini dapat berdampak pada pengangguran karena ketika upah minimum lebih tinggi, maka semakin banyak orang yang ingin bekerja. Namun, hal ini juga berarti bahwa dunia usaha mungkin mempekerjakan lebih sedikit pekerja karena mereka harus membayar gaji yang lebih tinggi. Jadi, mereka lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang mereka pekerjakan, yang bisa menyebabkan lebih banyak orang menganggur jika mereka tidak memenuhi persyaratan.

2. Dampak apa yang ditimbulkan dari naiknya UMK terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor industri batik di Kota Pekalongan?

Daya beli masyarakat merupakan tingkat kemampuan konsumen atau masyarakat luas dalam membeli dan memperoleh barang yang dibutuhkannya. Berdasarkan kemampuan tersebut, kebutuhan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :

- a. Permintaan efektif: konsumen dapat dan ingin membeli suatu produk.
- b. Permintaan absolut: konsumen tertarik dengan produk tersebut tetapi tidak mampu membayarnya.
- c. Permintaan potensial: Konsumen dapat membeli suatu produk tetapi mereka belum melakukannya.

Daya beli masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi penentuan target penjualan bagi pelaku usaha kecil, menengah, dan besar.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat :

1. Perubahan Harga

Faktor yang menentukan daya beli masyarakat adalah harga barang dan jasa. Daya beli masyarakat akan cenderung menurun ketika harga barang dan jasa meningkat.

Namun sebaliknya, daya beli masyarakat akan meningkat jika harga-harga tersebut turun.

2. Pendapatan riil masyarakat

Pendapatan riil adalah jumlah pendapatan setelah disesuaikan dengan perubahan harga. Setiap tahun harga komoditas cenderung meningkat. Ketika pendapatan riil meningkat, seseorang dapat membeli barang dan jasa lebih banyak dari biasanya.

3. Nilai tukar

Peningkatan nilai tukar suatu negara dapat membuat barang impor menjadi lebih murah sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Sebaliknya, harga Nilai suatu mata uang diperkirakan akan menurun. Hal ini menyebabkan harga komoditas meningkat dan pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat.

4. Pajak

Pajak dapat mengurangi jumlah pendapatan yang sebenarnya. Perlu Di ketahui bahwa pajak akan dihitung dengan cara mengurangi jumlah tersebut dari pendapatan. Hal ini menyebabkan perubahan nilai pajak mempengaruhi pendapatan riil. Meningkatnya pajak dapat menyebabkan konsumen mengurangi jumlah pengeluarannya. Padahal, daya beli masyarakat menjadi kunci utama mendorong aktivitas perekonomian.

5. Suku bunga

Suku bunga dapat berdampak besar terhadap daya beli masyarakat, karena kenaikan suku bunga membuat masyarakat lebih memilih mengurangi pengeluaran dengan pinjaman. Namun, sebaliknya, suku bunga rendah akan memudahkan masyarakat dalam mengajukan kredit.

Simpulan

1. Kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Kota Pekalongan diharapkan memberikan dampak positif bagi pekerja dan pengusaha, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait biaya produksi.
2. Proses penetapan UMK perlu mempertimbangkan keinginan pertumbuhan ekonomi lokal, menjaga daya saing industri, dan memastikan kesejahteraan pekerja.
3. Faktor-faktor seperti perubahan harga, pendapatan riil masyarakat, nilai tukar, pajak, dan suku bunga memiliki dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi

Referensi

- UMP 2023 Naik, Peluang Meningkatnya Daya Beli Masyarakat. (2022, Desember 10). Retrieved Desember 17, 2023, from detik.com: <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/d-6454370/ump-2023-naik-peluang-meningkatnya-daya-beli-masyarakat>
- Inflasi Gabungan Enam Kota di Jawa Tengah Oktober 2023 Sebesar 0,18 Persen - Inflasi Tertinggi di Kota Kudus Sebesar 0,27 Persen. (2023, November 1). Retrieved Desember 15, 2023, from [jateng.bps.go.id: https://jateng.bps.go.id/pressrelease/2023/11/01/1397/inflasi-gabungan-enam-kota-di-jawa-tengah-oktober-2023-sebesar-0-18-persen---inflasi-tertinggi-di-kota-kudus-sebesar-0-27-persen-.html#:~:text=Pada%20Oktober%202023%2C%20Inflasi%20gabungan,IHK\)%20sebes](https://jateng.bps.go.id/pressrelease/2023/11/01/1397/inflasi-gabungan-enam-kota-di-jawa-tengah-oktober-2023-sebesar-0-18-persen---inflasi-tertinggi-di-kota-kudus-sebesar-0-27-persen-.html#:~:text=Pada%20Oktober%202023%2C%20Inflasi%20gabungan,IHK)%20sebes)
- Adisasmita, R. (2013). Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aisyah. (n.d.). *Redesain Pasar Batik Setono Pekalongan*. Retrieved Desember 13, 2023, from [undip.ac.id: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5907/2/A%27ISYAH_21020116120016_BAB%20I.pdf](https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/5907/2/A%27ISYAH_21020116120016_BAB%20I.pdf)
- Dr. Achmad s.Ruky, s. m. (2002). Manajemen Penggajian & Pengupahan untuk Karyawan Perusahaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Idris, M. (2023, Januari 29). *Terbaru UMR Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan 2023*. Retrieved Desember 14, 2023, from [Kompas.com: https://money.kompas.com/read/2023/01/29/140713626/terbaru-umr-kota-pekalongan-dan-kabupaten-pekalongan-2023](https://money.kompas.com/read/2023/01/29/140713626/terbaru-umr-kota-pekalongan-dan-kabupaten-pekalongan-2023)
- Kurniawan, A. A. (2023, November 23). *UMK Pekalongan 2024 Siap Naik 4,02 Persen, Pekerja Bakal Terima Upah Rp. 2,3 Jutaan, cukup?* Retrieved Desember 14, 2023, from [nusahits.com: https://www.nusahits.com/regional/61610963580/umk-pekalongan-2024-siap-naik-402-persen-pekerja-bakal-terima-upah-rp23-jutaan-cukup?page=2](https://www.nusahits.com/regional/61610963580/umk-pekalongan-2024-siap-naik-402-persen-pekerja-bakal-terima-upah-rp23-jutaan-cukup?page=2)
- Mohammad Rosyada, M. (2023). *Stretegi Survival UMKM Batik Tulis Pekalongan*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI).
- PB, N. O. (2023, November 22). *UMK Kota Pekalongan 2024 Diusulkan Naik 15 Persen, Cek Disini Nominalnya*. Retrieved Desember 14, 2023, from [PojokBaca.id.: https://www.pojokBaca.id/pojok-jateng/223312452/umk-kota-pekalongan-2024-diusulkan-naik-15-persen-cek-disini-nominalnya?page=3](https://www.pojokBaca.id/pojok-jateng/223312452/umk-kota-pekalongan-2024-diusulkan-naik-15-persen-cek-disini-nominalnya?page=3)
- Sihotang, K. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soemarso. (2009). Akuntanai Suatu Pengantar Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Todaro, M. (2000). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Wiryawan, W. G. (2015). *Ironi Upah Minimum dalam Industri Pariwisata*. Malang: Media Nusa Creative.